

Pembangunan Tetap Berjalan Pendirian SMP 50 di Loa Bakung Dianggarkan Rp28,9 Miliar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 28/05/2024

Pemkot Samarinda tetap melanjutkan pembangunan SMP 50 di Jalan Lobang Tiga, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang meski sempat diwarnai klaim lahan.

SAMARINDA – Tahun ini Pemkot mengalokasikan anggaran Rp28,9 miliar untuk pembangunan sekolah baru tersebut.

PPK Pembangunan SMP 50 Muhammad Syafei menjelaskan, pembangunan sekolah dilakukan untuk menampung siswa di wilayah Lobang Tiga, Pal Besi, dan sekitarnya di Kelurahan Loa Bakung, mengingat kapasitas SMP 16 yang saat ini direvitalisasi menjadi sekolah terpadu. “Pada SMP 16 satu angkatan mampu menampung 8–9 rombongan belajar (rombel). Sedangkan sekolah baru nanti hanya disiapkan tiga rombel per angkatan. Makanya SMP 50 jadi alternatif untuk menampung siswa yang biasanya mampu ditampung SMP 16,” ungkapnya, Senin (27/5).

Pembangunan tahap awal meliputi satu gedung dua lantai dengan enam kelas dan gedung kantor tiga lantai. Gedung kantor akan dilengkapi ruang administrasi, musala, laboratorium, perpustakaan, ruang seni, dan IT. “Sekitar 15–20 persen dari lahan akan dialokasikan untuk ruang terbuka hijau (RTH), termasuk area hijau untuk pohon dan polder air,” terangnya.

Pihaknya tengah mengajukan penggantian pohon dari SMP 16 untuk dibagikan ke beberapa sekolah, termasuk SMP 50. Penanaman pohon dilakukan untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah yang rawan bencana longsor atau banjir. “Penanaman pohon akan berkoordinasi dengan DLH dan BPBD untuk teknisnya,” ujarnya.

Terkait klaim lahan, BPKAD Samarinda telah menyatakan pemkot memiliki sertifikat lahan tersebut. “Awal 2023 saat perencanaan, kami sudah memastikan kepastian lahan,” ujarnya.

Dia menargetkan pembangunan SMP 50 selesai akhir tahun ini. Sebab, Oktober mendatang gedung ruang kelas diharapkan sudah selesai agar bisa diisi perlengkapan atau fasilitas kelas. Pembangunan tidak bisa ditunda-tunda, meski ada masalah sosial yang tengah berjalan. “Kami akan usulkan anggaran *mebeler* di APBD Perubahan 2024, sehingga bisa segera dimanfaatkan,” ucapnya.

Sebagaimana *masterplan*, sekolah itu membutuhkan anggaran Rp55 miliar dengan dua gedung sekolah, satu gedung administrasi, polder, dan lapangan multifungsi. Namun, keterbatasan anggaran membuat pembangunan bertahap. “Tahun depan akan diusulkan kembali kelanjutan pembangunannya,” tegasnya.

Saat ini beberapa alat berat sudah terlihat melakukan pematangan lahan dan persiapan untuk memulai kegiatan pembangunan. Sebagai informasi, rencana pembangunan SMP 50 di kawasan Lobang Tiga, sempat diwarnai klaim dari warga yang mengaku ahli waris perusahaan HJP.

Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah memastikan bahwa lahan tersebut milik Pemkot Samarinda, dan telah bersertifikat. Sebelumnya perolehan awal tanah dibebaskan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) atau yang kini dikenal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebelum tahun 2000. Dengan luas dahulu sekitar 1 hektare. “Setelah pengukuran lahannya sekitar 7 ribu meter persegi. Untuk pembangunan kami sarankan Disdikbud berkoordinasi dengan kepolisian untuk pendampingan terkait potensi sosial atas klaim warga tersebut,” ujarnya. **(dra/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pembangunan Tetap Berjalan Pendirian SMP 50 di Loa Bakung Dianggarkan Rp 28,9 Miliar, 28/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diatur bahwa dalam hal objek pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya dan ganti kerugian ditiptikan di pengadilan negeri, ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersengketa tentang hapusnya alat bukti kepemilikan dan putusya hubungan hukum.

2. Dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur diatur sebagai berikut:
 - (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan sektor pendidikan.
 - (5) Penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan diprioritaskan pada pembiayaan untuk peningkatan akses, mutu, dan relevansi Pendidikan di wilayah Kalimantan Timur, demi terwujudnya visi dan misi pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur.